

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/ kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, Januari 2024

Paraf Hierarkis			
No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1	Asisten		23/1/24
2	Kabag		23/1/2024
	Kabag		23/1/24

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**  
  
**Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKjIP. Informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Sekretariat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tabel berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66	60,18 (2022)	88,5%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase Peningkatan Nilai (Skor) LPPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	3,24 (Sangat Tinggi)	3,1017 (Sedang)	96%
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditin daklanjuti	100% (Tahap Penetapan dan Tahap Sosialisasi Perbup pelimpahan Sebagian wewenang Bupati kepada Camat)	100% (Tahap Penetapan dan Tahap Sosialisasi Perbup pelimpahan Sebagian wewenang Bupati kepada Camat)	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase rumusan kebijakan di tetapkan di bidang Kesejahteraan Rakyat	100% (28 Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti)	100% (28 Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti)	100%
Meningkatnya Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	100% (340 produk hukum)	108% (366 produk hukum)	108%
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100% (2 rumusan kebijakan)	100% (2 rumusan kebijakan)	100%
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan barang/jasa melalui Bagian ULP	100% (54 paket)	100% (54 paket)	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP OPD $\geq$ baik "BB"	85% (43 Perangkat Daerah dari 50 Perangkat Daerah)	70% (35 Perangkat Daerah dari 50 Perangkat Daerah)	82,35%
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B	100% (50 Perangkat Daerah)	98% (49 Perangkat Daerah)	98%

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2023 Melalui LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja

Sekretariat Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa *outcome* (hasil) ataupun *impact* (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

## **1.2. Dasar Hukum**

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3. Gambaran Organisasi**

### **1.3.1. Gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk**

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Urusan Wajib dan otonomi daerah pelaksanaan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah yang meliputi administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas aparatur,

dan peningkatan kualitas kebijakan publik serta melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya

### **1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari:

#### **A. Sekretaris Daerah**

#### **B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum

#### **C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

1. Bagian Perekonomian
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
  - 3.1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa

4. Bagian Sumber Daya Alam

**D. Asisten Administrasi Umum**

1. Bagian Umum

2. Bagian Organisasi

3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

3.1. Subbagian Protokol

4. Bagian Perencanaan Dan Keuangan

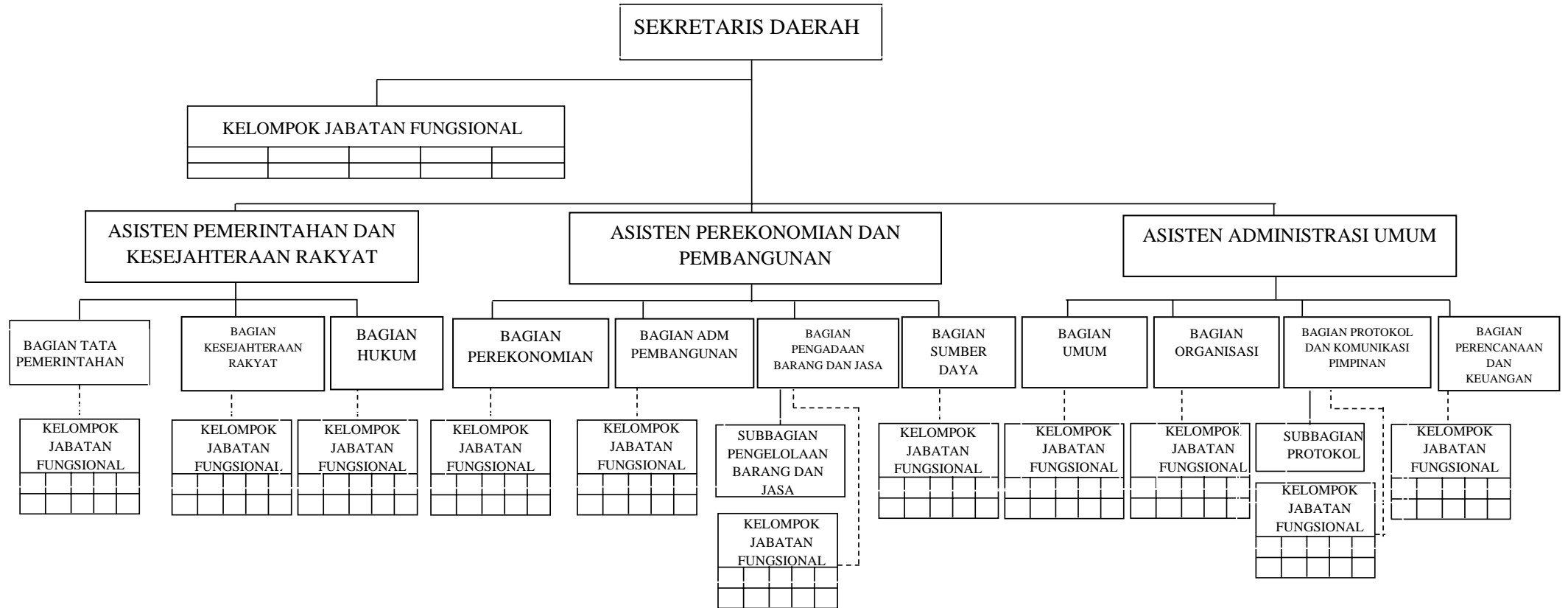


## Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

LAMPIRAN I

**PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai. Hal ini dikarenakan sumber daya aparatur memiliki peranan penting dan menjadi faktor utama dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki perencanaan program/kegiatan beserta perencanaan anggaran yang memadai namun jumlah sumber daya aparatur yang ada masih belum mencukupi / masih kurang dari jumlah idealnya, maka akan menjadi hambatan bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Adapun ketersediaan jabatan dan pemenuhan sumber daya aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Ketersediaan SDM Aparatur pada Sekretariat Daerah**

1. Asisten Administrasi Umum

a) Bagian Umum

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Umum	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda	1	2	-1
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1	0
Ajudan	2	4	-2
Pengelola Kepegawaian	0	1	-1
Pengelola Keuangan	0	1	-1
Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1	-1
Sekretaris	0	3	-3
Pengadministrasi Keuangan	2	3	-1
Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	1	1	0
Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	5	0
Pengemudi	6	13	-7
Pramu Bakti	4	13	-9
Pramu Kebersihan	0	6	-6

b) Bagian Organisasi

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Organisasi	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	3	0
Analisis Jabatan	1	1	0
Analisis Kelembagaan	0	1	-1
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	0	2	-2
Analisis Tata Laksana	1	1	0
Analisis Pelayanan Publik	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	0
Kasubag Protokol	1	1	0
Pranata Hubungan Masyarakat	0	1	-1
Pranata Acara	3	6	-3
Jurnalis	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengelola Keuangan	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat (Terampil)	0	2	-2
Pranata Komputer (Ahli Pratama)	0	2	-2

d) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
Perencana Ahli Muda	1	1	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1	0
Bendahara	1	1	0
Pengelola Keuangan	2	2	0
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	2	0
Pengadministrasi Keuangan	1	1	0

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a) Bagian Tata Pemerintahan

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	3	0
Analisis Pemerintahan Daerah	1	1	0
Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1	2	-1
Analisis Kerja Sama	0	1	-1
Pengelola Keuangan	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	2	2	0

b) Bagian Hukum

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Hukum	1	1	0
Penyuluh Hukum Ahli Muda	0	1	-1
Analisis Hukum Ahli Muda	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
Analisis Hukum Ahli Pertama	0	1	-1

<b>Jabatan</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>+/-</b>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	0	5	-5
Analisis Produk Hukum	2	2	0
Analisis Permasalahan Hukum	2	2	0
Pengelola Informasi Produk Hukum	0	2	-2
Pengelola Keuangan	0	1	-1
Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan	1	1	0
Pengadministrasian Umum	1	1	0

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

<b>Jabatan</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>+/-</b>
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	2	-1
Analisis Layanan Umum	1	2	-1
Analisis Kesejahteraan Rakyat	0	2	-2
Pengadministrasian Umum	1	1	0
Pengadministrasian Keuangan	1	1	0

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

a) Bagian Sumber Daya Alam

<b>Jabatan</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>+/-</b>
Kepala Bagian Sumber Daya Alam	1	1	0
Pengolah data	1	1	0
Pengadministrasian Umum	1	1	0
Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	0	1	-1
Analisis Kebijakan	2	2	0
Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0
Pengadministrasian Persuratan	1	1	0

b) Bagian Perekonomian

<b>Jabatan</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>+/-</b>
Kepala Bagian Perekonomian	1	1	0
Pengadministrasian Umum	1	1	0
Pengolah Data	1	1	0
Analisis Kebijakan	2	3	-1
Analisis Perekonomian	1	1	0

c) Bagian Pembangunan

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Pembangunan	1	1	0
Pengelola Program dan Laporan	1	1	0
Pengolah Data	1	1	0
Analisis Kebijakan	1	1	0
Perencana	2	1	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
Analisis Pembangunan	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	0	1	-1

d) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jabatan	B	K	+/-
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	0
Pengadministrasi Umum	2	1	1
Pengolah Data	3	1	2
Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Muda)	5	9	-4
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Madya)	0	1	-1
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1	1	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pertama)	9	15	-6

Keterangan :

"B" : *bezetting* – kondisi eksisting jumlah staf yang ada pada jabatan  
 "K" : Keadaan ideal jumlah staf yang dibutuhkan

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa hampir setiap Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk memiliki kekurangan dalam hal ketersediaan sumber daya aparatur. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang memengaruhi, diantaranya adalah adanya promosi / mutasi pegawai, serta adanya pegawai yang telah purna tugas / pensiun. Masih banyaknya kebutuhan sumber daya aparatur yang kosong / belum terisi, akan menjadi evaluasi di masa mendatang untuk segera dicukupi, demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depannya.

### 1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *“mindset and culture”* masih belum terlaksana;
2. Akuntabilitas Kinerja yang perlu ditingkatkan lagi yang meliputi nilai ukur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, keselarasan antara perencanaan dengan program kegiatan yang ada, semakin baiknya penyelarasan Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dengan Program Kegiatan yang ada.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Ikhtisar / Ringkasan Rencana Strategis Organisasi**

Menelaah visi misi dan program Kepala Daerah terpilih ditunjukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi capaian visi misi Kepala Daerah tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

Adapun rumusan visi kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho”***

Visi tersebut memberikan makna bahwa kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya visi tersebut memberikan makna bahwa pembangunan dimulai dari desa dengan membangun desa, dengan adanya desa yang maju diharapkan membawa dampak yang positif juga bagi perekonomian yang maju, yang juga berdampak positif bagi kota dalam hal ini menata kota.

Menelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 6 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Dinamis Dan Harmonis, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Serta Dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman, Dan Ketertiban;
2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih, Profesional Dan Akuntabel (*Accountable*) Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan;

3. Meningkatkan Kualitas, Pelayanan Dan Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Lokal Serta Sektor Produktif Lain Berbasis Teknologi Tepat Guna;
5. Meningkatkan Kebanggaan Terhadap Kesenian, Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Yang Mampu Mendorong Pembangunan Sektor Pariwisata;
6. Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dan Perlindungan Dari Bencana.

Telaahan terhadap Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat Daerah yang mendukung pernyataan Misi ke 2 :

***“Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih, Profesional Dan Akuntabel (Accountable) Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan”***

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Sekretariat Daerah berperan dalam pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan penguatan payung hukum berupa *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan :

#### **1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik**

- a) Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif;
- b) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif);
- c) Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang profesional, proporsional dan berkeadilan;
- d) Meningkatkan sinergitas kinerja eksekutif dan legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang) penyusunan kebijakan pembangunan dan produk hukum daerah;
- e) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;



- f) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (*E-Government*);
- g) Meningkatkan tata kelola kearsipan;
- h) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, inovasi;
- i) Mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif, cepat, ramah, berkualitas, transparan (*One Stop Service*);

## 2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

- a) Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan ASN melalui pemberian *reward and punishment* yang layak dan berkeadilan

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3,24 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Efektifitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100% (1 rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti)
		Presentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100% (28 rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti)
3	Meningkatnya Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Presentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100% (340 produk hukum)
4	Meningkatnya Efektifitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan	Presentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100% (2 rumusan kebijakan)
5	Meningkatnya Transparansi Proses Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	100% (54 paket)
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai SAKIP $\geq$ Sangat Baik "BB"	85% (43 Perangkat Daerah)
7	Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik	Presentase perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B "Baik"	100% (50 Perangkat Daerah)

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra Perangkat Daerah dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2023.

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2023 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan
5. Meningkatnya kematangan organisasi pengadaan barang/ jasa
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2023**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	$\frac{\text{Nilai tahun } n+1 - \text{Nilai LPPD tahun } n}{\text{Nilai LPPD Tahun } n} \times 100\%$	3.24 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Efektivitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat}} \times 100\%$	100%
		Presentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat}} \times 100\%$	100%
3	Meningkatnya Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Presentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya}}{\text{Jumlah produk hukum di Kabupaten Nganjuk}} \times 100\%$	100%
4	Meningkatnya Efektivitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan	Presentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan Asisten Perekonomian Dan Pembangunan}} \times 100\%$	100%
5	Meningkatnya Transparansi Proses Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilelang melalui ULP}}{\text{Jumlah paket pengadaan yang bernilai 200Jt berdasarkan RUP}} \times 100\%$	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai SAKIP $\geq$ sangat Baik "BB"	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang nilai SAKIP OPD } \geq \text{Sangat Baik "BB"}}{\text{Jumlah perangkat daerah Kab. Nganjuk}} \times 100\%$	85%
7	Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik	Presentase perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B "Baik"	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang nilai IKM } \geq \text{B "Baik"}}{\text{Jumlah perangkat daerah. Kab. Nganjuk}} \times 100\%$	100%

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang didukung oleh APBD Kab. Nganjuk dengan keseluruhan anggaran sebesar Rp 55.320.577.685,- (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan telah terserap sebesar 91% atau sejumlah Rp50.335.977.852,- (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria **SMART** sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu). Untuk mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, capaian rata-rata atas indikator kinerja terbagi menjadi lima

katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.1.1**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	<b>Tujuan :</b>					
1.	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66	60,18 (tahun 2022)	88,5%
	<b>Sasaran:</b>					
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	Nilai	3,24 (Sangat Tinggi)	3,1017 (Sedang)	96%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100% (Tahap Penetapan dan Tahap Sosialisasi Perbup pelimpahan Sebagian wewenang Bupati kepada Camat)	100% (Tahap Penetapan dan Tahap Sosialisasi Perbup pelimpahan Sebagian wewenang Bupati kepada Camat)	100%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang	%	100% (28 Rumusan Kebijakan)	100% (28 Rumusan Kebijakan)	100%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti		yang ditindaklanjuti)	yang ditindaklanjuti)	
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	%	100% (340 produk hukum)	108% (366 produk hukum)	108%
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100% (2 rumusan kebijakan)	100% (2 rumusan kebijakan)	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	%	100% (54 paket)	100% (54 paket)	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	%	85% (43 Perangkat Daerah dari 50 Perangkat Daerah)	70% (35 Perangkat Daerah dari 50 Perangkat Daerah)	82,35%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	%	100% (50 Perangkat Daerah)	98% (49 Perangkat Daerah)	98%

Secara umum, realisasi kinerja pada tahun 2023 memiliki capaian yang tinggi. Dari 7 (tujuh) sasaran yang ditargetkan pada tahun 2023, semuanya memiliki realisasi di atas 76%. Pada tujuan Sekretariat Daerah "Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi", indeks yang digunakan sebagai capaian adalah capaian indeks yang didapat pada tahun sebelumnya (tahun 2022). Hal ini dikarenakan rilis Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB untuk tahun 2023 belum diterbitkan hingga dokumen ini disusun.

Pada capaian nilai (skor) LPPD, terdapat perbedaan status antara tahun 2018 dengan tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan penilaian LPPD tahun 2018 masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan status sebagai berikut :

- a. Skor 3,00001 – 4,0000 Status Sangat Tinggi
- b. Skor 2,00001 – 3,0000 Status Tinggi
- c. Skor 1,00001 – 2,0000 Status Sedang
- d. Skor 0,00001 – 1,0000 Status Rendah

Sedangkan untuk penilaian LPPD pada tahun 2021 dan 2022, telah menggunakan dasar hukum yang baru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan status sebagai berikut:

- a. Skor 4,21 – 5,00 Status Sangat Tinggi
- b. Skor 3,41 – 4,20 Status Tinggi
- c. Skor 2,61 – 3,40 Status Sedang
- d. Skor 1,81 – 2,60 Status Rendah
- e. Skor 1,00 – 1,80 Status Sangat Rendah

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Tahun 2021-2022

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021-2022**

N No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Tujuan :							
1.	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65	66	66	59,04	60,18	60,18 (2022)
	Sasaran:							
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	96%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	70%	100%	100%	70%	75%	100%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	100%	132.3%	302%	108%
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



N No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
	bidang ekonomi pembangunan	pembangunan yang ditindaklanjuti						
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	100%	100%	100%	127%	249%	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "B"	-	-	-	-	-	-
		Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	55%	60%	85%	100%	100%	82,35%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	100%	100%	100%	100%	98%	98%

Sekretariat Daerah mempunyai peranan penting sebagai penyusun kebijakan dan koordinator pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 98%, sedangkan pada tahun 2022 nilai rata-rata capaian Sekretariat Daerah sebesar 117%, dan pada tahun 2021 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 77% yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Adanya penurunan rata-rata capaian kinerja dikarenakan masih adanya beberapa target sasaran yang belum terealisasi dan ada pula yang realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

**Tabel 3.1.3.1**  
**Target Kinerja Renstra 2018-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Tujuan :						
1.	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,29	61,01	65	66	66
	Sasaran:						
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	-	-	-	3.23%	3.24%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan	-	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
	dan kesejahteraan rakyat	yang ditindaklanjuti					
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	-	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	-	-	-	60%	85%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	100%	81%	100%	100%	100%

**Tabel 3.1.3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dengan Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
	Tujuan :				
1.	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66	60,18 (2022)	91,18%
	Sasaran:				
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3,24	3,1017	96%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	108%	108%
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase Paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	85%	70%	82,35%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	100%	98%	98%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, memiliki tingkat kemajuan sebesar 91,18% pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 masih menunggu rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang belum diterbitkan hingga dokumen ini disusun. Sedangkan Kinerja Sasaran yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator, kesemuanya memiliki tingkat kemajuan tinggi, yaitu di atas 75% terhadap target akhir Renstra.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Standar Nasional

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan kinerja Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk dengan standar nasional/internasional atau dengan kinerja instansi sejenis lainnya. Perbandingan kinerja tersebut dengan melihat adanya kesamaan Tujuan / Sasaran Strategis pada Kementerian / Lembaga / Instansi sejenis lainnya yang dijadikan *benchmark*. Dalam hal ini, Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dirumuskan secara komposit sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di daerah, sehingga terdapat beberapa Sasaran Strategis yang tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional. Sedangkan Tujuan Strategis mengambil standar nasional berupa Indeks Reformasi

Birokrasi sehingga dapat dibandingkan dengan daerah lain, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.4.**  
**Perbandingan Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023**  
**dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Provinsi Jawa Timur	Daerah Lain (Kab. Jombang)
	Tujuan :				
1.	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,18 (B)	>80 (A)	60,89 (B)
	Sasaran:				
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase Peningkatan Nilai ( <i>skor</i> ) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3,1017 (Sedang)	3,6970 (Tinggi)	3,3280 (Sedang)
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	108%	-	-
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	-	-
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	100%	-	-
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	82,35%	-	-
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	98%	-	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Perangkat Daerah yang mendukung indikator tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mendapat nilai 60,18 atau berada pada predikat B. Capaian tersebut secara predikat setara dengan Kabupaten Jombang yang juga memiliki predikat B, namun memiliki nilai yang lebih tinggi dengan capaian 60,89. Namun, nilai Kabupaten Nganjuk tersebut masih berada di bawah capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai di atas 80 dengan predikat A. Sedangkan untuk indikator “Persentase Peningkatan Nilai (*skor*)”

*LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023*

LPPD dengan kategori sangat tinggi”, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Perangkat Daerah yang mendukung indikator tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapat nilai 3,1017 dengan kategori rendah. Capaian tersebut berada di bawah Kabupaten Jombang yang memiliki nilai 2,78 dengan kategori Sedang. Nilai dan predikat Kabupaten Nganjuk juga masih berada di bawah capaian Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 3,61 yang memiliki kategori Tinggi.

Masih rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi prioritas utama bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk terus berbenah dan meningkatkan capaiannya pada tahun depan, sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan *good governance*.

### 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 11 Bagian memiliki 3 fungsi yaitu pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Setiap Bagian telah menjalankan fungsi berdasarkan tupoksi masing-masing dengan baik, sehingga mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, seluruh sasaran strategis memiliki capaian kinerja di atas 75%. Atas capaian sasaran strategis tersebut akan menjadi evaluasi dalam akhir periode renstra 2018-2023. Analisis lebih lanjut terkait keberhasilan maupun kegagalan pada pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1.5**  
**Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Tujuan :			
1.	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	91,18%	Adanya peningkatan kualitas hasil antara, pada 9 hasil antara yang menjadi penilaian Indeks RB
	Sasaran:			
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	96%	Telah terpenuhinya capaian 3 (tiga) unsur utama penilaian LPPD, yaitu Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta Laporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	Seluruh rumusan kebijakan di bidang pemerintahan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	Seluruh rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	108%	Dalam penyusunan produk hukum telah dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi untuk meminimalisir adanya potensi produk hukum yang bertentangan dengan peraturan di atasnya
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	Seluruh rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	100%	Transparansi pengadaan barang dan jasa semakin meningkat dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang proses pengadaan barang dan jasa, seperti SIRUP dan LPSE
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	82,32%	Perangkat daerah telah berkomitmen dalam penyelenggaraan SAKIP, namun ada beberapa Perangkat Daerah yang masih perlu meningkatkan komitmennya dalam penyelenggaraan SAKIP
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	98%	Adanya e-SUKMA Jatim memudahkan Perangkat Daerah maupun Masyarakat dalam mengisi survey kepuasan masyarakat

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasarannya pada tahun 2023 sebesar Rp 55.320.577.685,- dengan realisasi sebesar Rp 50.335.977.852,- atau 91% sehingga terdapat efisiensi sebesar 11,3%. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	96%	93%	3%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	87,7%	12,30%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	94,9%	5,10%
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	108%	70%	38%
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	85,8%	14,2%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian ULP	100%	85%	15%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	82,35%	86%	-3,65%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	98%	91%	7%

### **3.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran. Keberhasilan program/kegiatan tersebut, selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan capaian kinerja tiap Sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.7**

### Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
	Tujuan :									
	Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66	60,18	91,18 %					
	Sasaran :									
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3,24	3,1017	96%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,24	3,1017	96%
						Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	43 dok	43 Dok	100%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,24	3,1017	96%
						Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	43 dok	43 Dok	100%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,24	3,1017	96%
						Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen pelaksanaan kesejahteraan rakyat	71 Dok	74 Dok	104%
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	108%	108%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,24	3,1017	96%
						Fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah Dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum	1140 Dok	1299 Dok	113%
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah dibidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan	100%	100%	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangu	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
		yang ditindak lanjuti					n yang ditetapkan			
						Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang ditetapkan	100%	100%	100%
						Pelaksanaan administrasi pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditetapkan	100%	100%	100%
						Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase Paket pengadaan yang dilelang melalui Bagian ULP	100%	100%	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan yang ditetapkan	100%	100%	100%
						Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Tersedianya dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	601 Dok	1298 Dok	215%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD $\geq$ sangat baik "BB"	85%	70%	82,35 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	100%
						Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM $\geq$ B (baik)	100%	98%	98%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	100%
						Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 Dok	28 Dok	100%
						Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi	13 Laporan	13 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan				
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%	
						Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah				
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Dok	20 Dok	100%	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	296 Dok	280 Dok	94%	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Paket	5 Paket	100%	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8180 Lap	6162 Lap	75,33 %	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301 unit	301 unit	100%	
						Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Lap	13 Lap	92%	
						Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dok	5 Dok	100%	
						Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Laporan Kegiatan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1470	1485	101%	

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023, terdapat anggaran total sejumlah Rp55.320.577.685,- dengan realisasi sebesar Rp 50.335.977.852,- atau 31% dari total anggaran. Secara ringkas, komposisi penggunaan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung APBD sebesar Rp 38.905.535.525,- terealisasi sebesar Rp 35.427.130.192,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 91%.
- b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat didukung APBD sebesar Rp 14.133.420.370,- terealisasi sebesar Rp 12.956.553.327,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 92%.
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan didukung APBD sebesar Rp 2.281.621.790,- terealisasi sebesar Rp. 1.952.294.333,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 86%.

Sedangkan capaian realisasi anggaran pada Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut :

**Tabel 3.2.1.**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4 1 1 2 0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 184.816.200</b>	<b>Rp 194.316.200</b>	<b>Rp118.744.680</b>	<b>Rp75.571.520</b>	<b>96%</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 61.244.050	Rp 61.244.050	Rp45.664.960	Rp15.579.090	75%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 14.232.250	Rp 14.232.250	Rp 4.071.000	Rp 10.161.250	29%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 36.045.300	Rp 45.545.300	Rp 36.015.160	Rp 9.530.140	79%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 73.294.600	Rp 73.294.600	Rp 32.993.560	Rp 40.301.040	45%
4 1 1 2 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 17.436.621.250</b>	<b>Rp 18.237.261.250</b>	<b>Rp 16.425.086.528</b>	<b>Rp 1.812.174.722</b>	<b>90%</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 17.390.492.000	Rp 18.191.132.000	Rp 16.385.589.118	Rp 1.805.542.882	90%
	5 Koordinasi dan Penyusunan	Rp 5.148.750	Rp 5.148.750	Rp 4.083.250	Rp 1.065.500	79%

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 40.980.500	Rp 40.980.500	Rp 35.414.160	Rp 5.566.340	86%
<b>4 1 1 2 0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 417.002.450</b>	<b>Rp 817.002.450</b>	<b>Rp 673.641.721</b>	<b>Rp 143.360.729</b>	<b>82%</b>
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 60.700.000	Rp 60.700.000	Rp 54.991.000	Rp 5.709.000	91%
	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 4.737.400	Rp 4.737.400	Rp 1.243.000	Rp 3.494.400	26%
	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	0%
	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 8.500.000	Rp 4.700.000	64%
	1 1 Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp 338.365.050	Rp 738.365.050	Rp 608.907.721	Rp 129.457.329	82%
<b>4 1 1 2 0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 2.715.099.606</b>	<b>Rp 3.857.810.892</b>	<b>Rp 3.502.012.978</b>	<b>Rp 355.797.914</b>	<b>91%</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.726.706	Rp 109.302.842	Rp 83.120.036	Rp 26.182.806	76%
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.274.950	Rp 76.030.100	Rp 74.148.250	Rp 1.881.850	98%
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.163.177.350	Rp 1.566.177.350	Rp 1.347.636.325	Rp 218.541.025	86%
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 187.605.600	Rp 263.355.600	Rp 249.238.250	Rp 14.117.350	95%
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Rp 18.984.000	Rp 16.000	100%

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
	Perundang undangan								
	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 6.340.000	Rp 1.660.000	79%			
	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.204.115.000	Rp 1.756.745.000	Rp 1.670.146.117	Rp 86.598.883	95%			
	1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	Rp 52.400.000	Rp 6.800.000	89%			
4	1	1	2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.637.598.276</b>	<b>Rp 4.245.525.290</b>	<b>Rp 4.130.685.026</b>	<b>Rp 114.840.264</b>	<b>97%</b>
			7	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	0%
			5	5 Pengadaan Mebel	Rp 530.594.200	Rp 1.237.428.300	Rp 1.155.455.000	Rp 81.973.300	93%
			6	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 557.844.926	Rp 1.887.420.183	Rp 1.862.212.076	Rp 25.208.107	99%
			1	0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 60.059.800	Rp 208.077.457	Rp 206.148.500	Rp 1.928.957	99%
			1	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 489.099.350	Rp 912.599.350	Rp 906.869.450	Rp 5.729.900	99%
4	1	1	2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.741.439.750</b>	<b>Rp 1.999.639.750</b>	<b>Rp 1.859.074.364</b>	<b>Rp 140.565.386</b>	<b>93%</b>
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-	100%
			2	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.016.000.000	Rp 1.016.000.000	Rp 983.817.939	Rp 32.182.061	97%
			3	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 143.508.000	Rp 290.008.000	Rp 222.411.480	Rp 67.596.520	77%

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 580.931.750	Rp 692.631.750	Rp 651.844.945	Rp 40.786.805	94%
4 1 1 2 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 3.761.980.550</b>	<b>Rp 4.656.643.093</b>	<b>Rp 4.557.455.470</b>	<b>Rp 99.187.623</b>	<b>98%</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Rp 279.691.850	Rp 329.671.350	Rp 295.727.526	Rp 33.943.824	90%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 749.726.350	Rp 1.360.090.050	Rp 1.321.735.298	Rp 38.354.752	97%
	5 Pemeliharaan Mebel	Rp 89.065.000	Rp 89.065.000	Rp 88.670.600	Rp 394.400	100%
	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 122.388.800	Rp 151.888.800	Rp 151.790.000	Rp 98.800	100%
	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 2.458.710.950	Rp 2.663.530.293	Rp 2.637.522.046	Rp 26.008.247	99%
	1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 62.397.600	Rp 62.397.600	Rp 62.010.000	Rp 387.600	99%
4 1 1 2 1 1	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Rp 939.651.050</b>	<b>Rp 982.293.850</b>	<b>Rp 719.473.655</b>	<b>Rp 262.820.195</b>	<b>73%</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 805.206.000	Rp 805.206.000	Rp 573.813.755	Rp 231.392.245	71%
	2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Rp 134.445.050	Rp 177.087.850	Rp 145.659.900	Rp 31.427.950	82%

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	dan Wakil Kepala Daerah					
4 1 1 2 1 3	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Rp 384.955.200</b>	<b>Rp 384.955.200</b>	<b>Rp302.374.385</b>	<b>Rp82.580.815</b>	<b>79%</b>
	1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 134.754.700	Rp 134.754.700	Rp 103.657.820	Rp 31.096.880	77%
	2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 56.396.500	Rp 56.396.500	Rp 42.925.362	Rp 13.471.138	76%
	3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 66.274.800	Rp 66.274.800	Rp 56.895.326	Rp 9.379.474	86%
	4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 63.329.500	Rp 63.329.500	Rp 47.028.800	Rp 16.300.700	74%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 64.199.700	Rp 64.199.700	Rp 51.867.077	Rp 12.332.623	81%
4 1 1 2 1 4	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp 2.630.087.550</b>	<b>Rp 3.530.087.550</b>	<b>Rp3.138.581.385</b>	<b>Rp391.506.165</b>	<b>89%</b>
	1 Fasilitasi Keprotokolanan	Rp 897.178.150	Rp 1.297.178.150	Rp1.125.077.428	Rp 172.100.722	87%
	2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 341.739.400	Rp 441.739.400	Rp315.047.456	Rp 126.691.944	71%
	3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 1.391.170.000	Rp 1.791.170.000	Rp 1.698.456.501	Rp 92.713.499	95%
4 1 2 2 0 1	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Rp 469.373.850</b>	<b>Rp 544.373.850</b>	<b>Rp488.302.877</b>	<b>Rp56.070.973</b>	<b>90%</b>
	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 92.044.600	Rp 142.044.600	Rp122.947.410	Rp19.097.190	87%
	2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 168.286.350	Rp 193.286.350	Rp 171.212.087	Rp 22.074.263	89%
	3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 209.042.900	Rp 209.042.900	Rp 194.143.380	Rp 14.899.520	93%
4 1 2 2 0 2	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp 10.958.535.200</b>	<b>Rp 11.865.431.200</b>	<b>Rp11.261.091.038</b>	<b>Rp604.340.162</b>	<b>95%</b>
	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 8.984.250.900	Rp 9.691.146.900	Rp 9.522.470.878	Rp 168.676.022	98%
	2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait	Rp 1.974.284.300	Rp 2.174.284.300	Rp 1.738.620.160	Rp 435.664.140	80%

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Kesejahteraan Sosial					
	3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	0%
4 1 2 2 0 3	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Rp 827.087.800</b>	<b>Rp 1.723.615.320</b>	<b>Rp1.207.159.412</b>	<b>Rp516.455.908</b>	<b>70%</b>
	1 Fasilitasi Penyusunan Pruduk Hukum Daerah	Rp 200.815.000	Rp 220.815.000	Rp 159.529.444	Rp 61.285.556	72%
	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 491.000.000	Rp 471.000.000	Rp 276.859.367	Rp 194.140.633	59%
	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 135.272.800	Rp 1.031.800.320	Rp 770.770.601	Rp 261.029.719	75%
4 1 3 2 0 1	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Rp 341.772.000</b>	<b>Rp 341.772.000</b>	<b>Rp302.131.280</b>	<b>Rp39.640.720</b>	<b>88%</b>
	1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Rp 107.570.000	Rp 107.570.000	Rp 94.532.420	Rp 13.037.580	88%
	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 107.000.000	Rp 107.000.000	Rp 93.824.950	Rp 13.175.050	88%
	3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 127.202.000	Rp 127.202.000	Rp 113.773.910	Rp 13.428.090	89%
4 1 3 2 0 2	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp496.500.000</b>	<b>Rp496.500.000</b>	<b>Rp381.946.410</b>	<b>Rp114.553.590</b>	<b>77%</b>
	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp 221.500.000	Rp 221.500.000	Rp 167.404.910	Rp 54.095.090	76%
	3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000	Rp 214.541.500	Rp 60.458.500	78%
4 1 3 2 0 3	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp838.099.790</b>	<b>Rp 838.099.790</b>	<b>Rp714.317.763</b>	<b>Rp 123.782.027</b>	<b>85%</b>
	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp439.355.390	Rp 439.355.390	Rp383.298.035	Rp 56.057.355	87%
	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp126.544.500	Rp 126.544.500	Rp116.156.000	Rp 10.388.500	92%



Kode Rekening				Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	Sisa	%
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
			3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp272.199.900	Rp 272.199.900	Rp214.863.728	Rp 57.336.172	79%
4	1	3	204	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp455.250.000</b>	<b>Rp 605.250.000</b>	<b>Rp553.898.880</b>	<b>Rp51.351.120</b>	<b>92%</b>
			1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp 197.000.000	Rp 347.000.000	Rp 311.162.480	Rp 35.837.520	90%
			2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 185.500.000	Rp 185.500.000	Rp 179.421.000	Rp 6.079.000	97%
			3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 72.750.000	Rp 72.750.000	Rp 63.315.400	Rp 9.434.600	87%
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 46.235.870.522</b>	<b>Rp 55.320.577.685</b>	<b>Rp 50.335.977.852</b>	<b>Rp 4.984.599.833</b>	<b>91%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasar pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja.

Dari Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa :

2. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah dengan indikator **Peningkatan Nilai (*skor*) LPPD dengan kategori sangat tinggi** sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mendapat nilai 3,1017 dengan kategori sedang, memberikan capaian sebesar 96%.

Pada capaian nilai (*skor*) LPPD, terdapat perbedaan *range* / predikat antara tahun 2018 dengan tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan penilaian LPPD tahun 2018 masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan *range* sebagai berikut :

- a. Skor 3,00001 – 4,0000 Status Sangat Tinggi
- b. Skor 2,00001 – 3,0000 Status Tinggi
- c. Skor 1,00001 – 2,0000 Status Sedang
- d. Skor 0,00001 – 1,0000 Status Rendah

Sedangkan untuk penilaian LPPD pada tahun 2021 dan 2022, telah menggunakan dasar hukum yang baru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan *range* sebagai berikut:

- f. Skor 4,21 – 5,00 Status Sangat Tinggi
- g. Skor 3,41 – 4,20 Status Tinggi
- h. Skor 2,61 – 3,40 Status Sedang
- i. Skor 1,81 – 2,60 Status Rendah
- j. Skor 1,00 – 1,80 Status Sangat Rendah

Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah laporan yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- a) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, data yang diperoleh antara lain :
    - Capaian Kinerja Makro
    - Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah
    - Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
  - b) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan;
  - c) Laporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).
3. Sasaran Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan indikator **Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan dibidang di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti** sudah terealisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sehingga capaian pada indikator sasaran mencapai 100%, sedangkan pada **Indikator Persentase rumusan kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti** telah terealisasi 28 rumusan kebijakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga capaian pada indikator sasaran mencapai 100%, Adapun 28 Rumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti antara lain :
- a. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Huffadz/Pembaca Al Quran dalam rangka Khataman Al Quran Tahun 2023;
  - b. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Pembina Calon menghafal Al Quran Kab Nganjuk Tahun 2023;
  - c. SK Bupati Nganjuk tentang Penetapan Pengurus Takmir Masjid Agung Baitussalam Kab Nganjuk periode tahun 2023-2025;
  - d. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan dan Penetapan Imam dan Muadzin Sholat Wajib di Masjid Agung Baitussalam Kab Nganjuk;

- e. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Pembina Kegiatan Pembinaan MTQ Kab Nganjuk Tahun 2023;
- f. SK Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Petugas Tadarus Al Quran dalam Bulan Suci Ramadhan 1444H/2023M;
- g. SK Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kab Nganjuk Tahun 2023;
- h. SK Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Evaluasi terhadap Usulan Monev atas Pemberian Hibah Daerah untuk Pembangunan Tempat Ibadah;
- i. SK Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Evaluasi terhadap Usulan Monev atas Pemberian Hibah Daerah;
- j. SK Bupati Nganjuk tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Ponpes, Madin dan TPQ di Kabupaten Nganjuk;
- k. SK Bupati Nganjuk tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pemberian Insentif Guru TPQ, Guru Sekolah Minggu/ Pembina;
- l. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Pembina dan Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Pembina Calon Peserta MTQ Kab Nganjuk Tingkat Provinsi Jawa Timur TA 2023;
- m. SK Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kab Nganjuk Tahun 1444H/2023M;
- n. SK Bupati Nganjuk tentang Penetapan dan Pemberian Honorarium bagi Imam dan Muadzin Sholat Maktubah di Masjid Agung Baitussalam Kab Nganjuk TA 2023;
- o. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Narasumber dan Penetapan Pemberian Honorarium bagi Narasumber Pembinaan Kepemimpinan Gereja Kab Nganjuk TA 2023;
- p. SK Bupati Nganjuk tentang Penetapan Imam dan Muadzin Sholat Maktubah di Masjid Agung Baitussalam Kab Nganjuk TA 2023;
- q. SK Perubahan atas Keppub Nganjuk Nomor 188/278/K/411.012/2023 tentang Penunjukan Narasumber dan Penetapan Pemberian Honorarium bagi Narasumber Pembinaan Kepemimpinan Gereja Kab Nganjuk TA 2023;
- r. SK Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Pembina dan Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Pembina Calon Peserta MTQ Kab Nganjuk Tingkat Provinsi Jawa Timur TA 2023;

- s. SK Bupati Nganjuk nomor 188/412/K/411.012/2023 tentang Penunjukan Kafilah dan Penetapan Pemberian Bantuan Transport bagi Kafilah MTQ Kab Nganjuk pada penyelenggaraan MTQ XXX Tingkat Prov Jatim TA 2023;
  - t. SK Bupati Nganjuk Nomor 188/445/K/411.012/2023 tentang perubahan SK Bupati Nganjuk nomor 188/412/K/411.012/2023 tentang Penunjukan Kafilah dan Penetapan Pemberian Bantuan Transport bagi Kafilah MTQ Kab Nganjuk pada penyelenggaraan MTQ XXX Tingkat Prov Jatim TA 2023;
  - u. SK Bupati Nganjuk Nomor 188/231/K/411.013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kab Nganjuk Periode Tahun 2023-2028;
  - v. SK Bupati Nganjuk Nomor 188/241/K/411.013/2023 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kab Nganjuk Periode Tahun 2023-2028;
  - w. SK bupati no. 188/503/K/411.012/2023 tentang pembentukan panitia pelaksana peringatan hari santri nasional di kabupaten Nganjuk tahun 2023;
  - x. SK bupati no. 188/514/K/411.012/2023 tentang penetapan pemberian uang penghargaan atas suatu prestasi kepada pemenang MTQ tingkat provinsi jawa timur XXX tahun 2023 dari kab Nganjuk;
  - y. SK bupati no. 188/520/K/411.012/2023 tentang pembentukan juri dan penetapan pemberian honorarium bagi juri lomba hari santri kabupaten Nganjuk;
  - z. SK bupati no. 188/527/K/411.012/2023 tentang penetapan pemenang lomba hari santri kab Nganjuk tahun 2023;
  - aa. SK bupati no. 188/528/K/411.012/2023 tentang penetapan pemberian uang penghargaan atas suatu prestasi kepada pemenang lomba hari santri kab Nganjuk tahun 2023;
  - bb. SK bupati no. 188/587/K/411.012/2023 tentang perubahan atas keputusan bupati Nganjuk no. 188/33/K/411.012/2023 tentang penunjukan huffadz Pembina dan penetapan pemberian honorarium bagi huffadz Pembina calon penghafal al-qur'an kab Nganjuk tahun 2023;
4. Sasaran Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas dengan indikator **Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya** dengan target

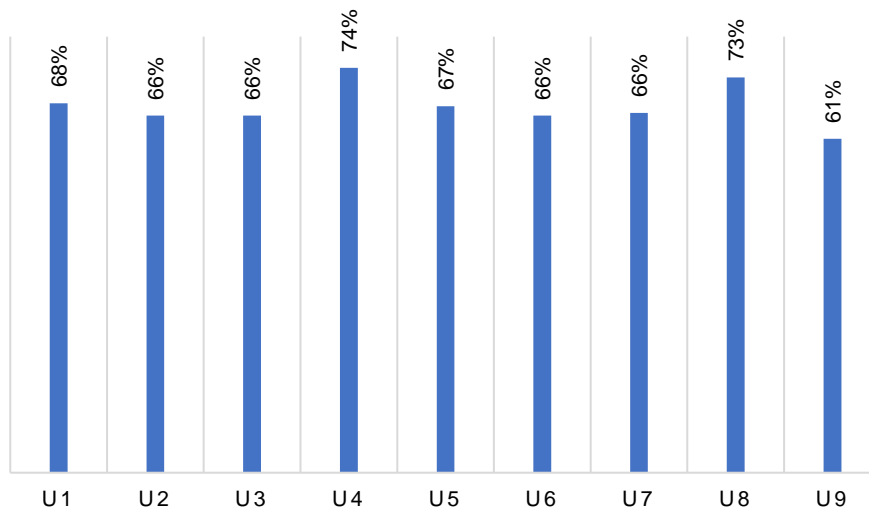
340 produk hukum terealisasi 366 produk hukum sehingga capaian pada indikator sasaran mencapai 108%;

5. Sasaran Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan dengan indikator **Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti**, dengan target 2 rumusan kebijakan terealisasi 2 rumusan kebijakan antara lain Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Seleksi Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi pada PT. BPR Anjuk Ladang dan SK Bupati Nganjuk tentang Tim TPID Tahun 2023;
6. Sasaran Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa dengan indikator **Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP** dengan target 54 paket pengadaan barang/jasa yang dilelang melalui bagian ULP terealisasi 54 paket sehingga capaian pada indikator sasaran mencapai 100%;
7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator **Persentase nilai SAKIP OPD  $\geq$  baik "BB"** dengan target 85% (43 dari 50 Perangkat daerah) terealisasi 70% (35 dari 50 perangkat daerah) sehingga capaian pada indikator sasaran ini mencapai 82,35%, Adapun 15 Perangkat Daerah yang **tidak memiliki** nilai SAKIP OPD  $\geq$  sangat baik "BB" sebagaimana berikut:

- 1) Dinas PMPTSP
- 2) Dinas Koperasi dan UM
- 3) Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Kecamatan Gondang
- 5) Kecamatan Ngetos
- 6) Kecamatan Ngluyu
- 7) Kecamatan Berbek
- 8) Kecamatan Nganjuk
- 9) Kecamatan Patianrowo
- 10) Kecamatan Sawahan
- 11) Kecamatan Prambon
- 12) Kecamatan Bagor
- 13) Kecamatan Rejoso
- 14) Kecamatan Lengkong
- 15) Kecamatan Loceret

8. Sasaran Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik dengan indikator **Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM  $\geq$  B (baik)** dengan target 100% (50 perangkat daerah) terealisasi 98%(49 dari 50 perangkat daerah). Adapun Perangkat Daerah yang memperoleh nilai IKM  $\leq$  B yaitu :
- a. Kecamatan Baron

**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baron  
Tahun 2023**



Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan
- U6 : Kompetensi Pelaksana
- U7 : Perilaku Pelaksana
- U8 : Sarana dan Prasarana
- U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari ke-9 Unsur IKM diatas, capaian IKM Kecamatan Baron yang masih tergolong lemah tersebar di beberapa unsur. Hanya ada 2 unsur yang memiliki capaian yang cukup baik, yaitu U4 (Biaya/Tarif) dan U8 (Sarana dan Prasarana).

#### 4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk perlu melakukan upaya dan tindak lanjut untuk meningkat kinerja menjadi lebih baik dan akuntabel, Adapun upaya dan beberapa tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan perencanaan dan penganggaran kas pada tahun berikutnya, untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan desk implementasi SAKIP ke Perangkat Daerah, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman para stakeholder yang ada di masing-masing Perangkat Daerah terhadap implementasi SAKIP, terutama pada Perangkat Daerah yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan demikian, Perangkat Daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP ke predikat yang lebih baik.
3. Dalam rangka meningkatkan nilai IKM, Perangkat Daerah supaya melakukan pembinaan kepada pegawainya untuk meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kecepatan waktu dalam hal pelayanan publik sesuai dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan pada Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan nilai LPPD sesuai target yang telah ditentukan, perlu dilaksanakan penajaman terhadap 3 unsur penilaian LPPD yang masih mendapatkan nilai rendah. Beberapa Langkah tersebut diantaranya adalah:
  - Melaksanakan studi banding ke kabupaten lain yang memiliki capaian nilai / skor LPPD dengan predikat "Tinggi" untuk melakukan *benchmarking* dengan daerah lain terkait teknis kegiatan penyusunan LPPD;
  - Melaksanakan rapat teknis / desk bersama Perangkat Daerah terkait untuk mengetahui titik lemah maupun kendala dalam penyusunan LPPD;
  - Melaksanakan reuiu Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dalam rangka penyesuaian target kinerja pada sasaran "meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi Daerah" dengan indikator Nilai EKPPD.

Nganjuk, Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

**Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

Paraf Hierarkis			
No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1	Asisten		23/1/24
2	Kabag		23/1/2024
3	Kasubbag		23/1/24



## LAMPIRAN

1. Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan kabupaten / kota Tahun 2022
2. Perbup Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
3. Daftar rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti tahun 2023
4. Daftar Produk Hukum tahun 2023 yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya
5. Perbup Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/396/K/411.013/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk
7. Rekapitulasi Paket pengadaan yang dilelang melalui Bagian ULP tahun 2023
8. Rekapitulasi Nilai SAKIP Tahun 2023
9. Data IKM Kabupaten Nganjuk Periode II (Mei-Juli 2023)